

NU, Muhammadiyah, Masyumi: Sejarah Ironi Ukhuwah Islamiyah

Home / Ihram / Dalam Negeri

**NU, Muhammadiyah, Masyumi: Sejarah Ironi Ukhuwah Islamiyah**

Ahad, 27 Dec 2020, 08:52 WIB Redaktur: Muhammad Subarkah

Komentar



Raja Pakubuwono X ketika berkunjung ke Masjid Luar Batang 1920

IHRAM.CO.ID, Oleh: **Ahmad Choirul Rofiq** (Dosen IAIN Ponorogo)

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di kabinet pemerintahannya, menyusul Prabowo Subianto yang sebelumnya diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dengan demikian, mantan capres

Puas internetan dengan Perdana Tri. Nikmati Welcome Kuota 6 GB. Rp. 6.000

INDOMIE GORENG AYAM GEPREK!

TERPOPULER

- Masa Tunggu Haji di Kalteng Capai 24 Tahun
- Aplikasi Tanaqqol Bantu 15 Ribu Jamaah di Masjid Al-Haram

DISKON 50.16

## NU, MUHAMMADIYAH, MASYUMI: SEJARAH IRONI UKHUWAH ISLAMIYAH

**Ahmad Choirul Rofiq**

**Dosen IAIN Ponorogo, ahmadchoirulrofiq@iainponorogo.ac.id (081331807355)**

Presiden Joko Widodo melantik Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat *reshuffle* (perubahan susunan) kabinet pemerintahannya tanggal 23 Desember 2020. Sandiaga menyusul pasangan pilpresnya, Prabowo Subianto, yang sebelumnya diangkat menjadi Menteri Pertahanan tanggal 23 Oktober 2019. Dengan demikian, mantan capres dan cawapres itu telah bergabung secara total ke dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Keikutsertaan keduanya dalam gerbong kekuasaan tersebut mungkin demi kebersamaan dalam pembangunan untuk kesejahteraan Indonesia serta menunjukkan sifat kenegarawanan di hadapan rakyat Indonesia dengan menghapuskan unsur rivalitas di antara mereka.

Namun dapat dimaklumi pula tatkala ada anggapan sebagian masyarakat bahwa sikap mereka itu semakin menegaskan bahwa permainan politik itu tidak mengenal lawan ataupun kawan abadi sebab raihan kursi jabatan kekuasaan itulah yang dikedepankan dan menjadi tujuan utama, meskipun idealisme yang konon diperjuangkannya justru ditinggalkan. Selain itu, dalam sistem demokrasi diperlukan kelompok oposisi yang berfungsi sebagai penyeimbang untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya rakyat Indonesia tidak menghendaki lagi pelaksanaan kekuasaan yang dijalankan tanpa koreksi sedikitpun dari rakyat karena adanya ketakutan menyampaikan saran konstruktif kepada penguasa (yang pada hakikatnya pemimpin pemerintahan merupakan pelayan dan pelaksana amanat rakyat).

Pemerintahan absolut semacam itulah yang dulu pernah dijalankan Indonesia di era Orde Lama maupun Orde Baru sebelum reformasi 1998. Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Soekarno (yang ditetapkan sebagai presiden seumur hidup) menyatakan bahwa siapapun yang tidak menyetujui Nasakom (penyatuan nasionalis, agama, dan komunis) berarti menolak Pancasila dan UUD 1945 serta kontra-revolusi. Demikian dikatakan Ahmad Syafii Maarif dalam karyanya *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Sedangkan pada masa sebelum reformasi, menurut M. Alwi Kaderi dalam *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Soeharto (yang menancapkan tonggak Orde Baru dan berkuasa sejak memegang Supersemar 1966) melabeli siapapun yang menentang pemerintahannya sebagai anti Pancasila. Akhirnya, kedua penguasa itupun dilengserkan secara paksa setelah terjadi kekisruhan politik dan krisis ekonomi.

Pada level elit politik langkah pemerintahan Joko Widodo itu mungkin dapat meredam perselisihan di antara mereka. Tetapi di tingkat lapisan bawah (yang sebelum pemilu mati-matian mendukung serta mengkampanyekan capres dan cawapres mereka) ternyata masih dijumpai perseteruan sengit. Berbagai ujaran kebencian dan permusuhan kerap muncul di masyarakat antara para pendukung penguasa dan orang-orang yang mengkritik pemerintah. Sebutan "cebong" (untuk mereka yang selalu membenarkan penguasa), "kampret", "kadrun", dan "kadal gurun" (bagi mereka yang menyampaikan kritik kepada pemerintah) masih kerap dilontarkan di media sosial (*facebook, whatsapp, twitter*), dan lain-lain. Bahkan olok-olokan itupun muncul di kalangan penganut agama Islam, baik khalayak awam maupun yang berpendidikan tinggi sekalipun. Lebih miris lagi tatkala cemoohan ditujukan pula kepada tokoh Islam yang kritis kepada pemerintah.

Fenomena permusuhan sesama Muslim semacam itu seakan-akan telah mengikis ikatan persaudaraan Islam. Akibatnya, kerugian tentu dialami sendiri oleh kaum Muslimin. Kita (sebagai warga Indonesia dan sekaligus pemeluk agama Islam) perlu melakukan refleksi tentang ukhuwah Islamiyah itu karena keterbelahan umat itu mestinya tidak dikehendaki terjadi. Pembahasan mengenai kesatuan dan perpecahan umat Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah Indonesia, yakni keberadaan organisasi penting bernama MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang dipergunakan umat untuk memperjuangkan kemaslahatan Islam secara bersama-sama.

Menurut Choirul Anam di dalam bukunya *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, MIAI terbentuk atas inisiatif para tokoh pergerakan Islam, yaitu KH Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang (Nahdlatul Ulama), KH Ahmad Dahlan dari Surabaya (Nahdlatul Ulama, bukan pendiri Muhammadiyah), KH Mas Mansur dari Surabaya (Muhammadiyah), dan Warkhadun Wondoamiseno dari Pasuruan (Sarekat Islam) ketika mereka mengadakan rapat tanggal 18-21 September 1937 di Pesantren Kebondalem, Surabaya, yang diasuh KH Ahmad Dahlan. Pembentukan MIAI itu termotivasi oleh QS. Ali 'Imran [3]: 103, artinya *Berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah Swt dan janganlah bercerai berai*".

Di samping itu, kesepakatan mendirikan MIAI itu sekaligus menindaklanjuti seruan persatuan dari Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari (ulama panutan kaum Muslimin Indonesia) di forum Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin pada 8-12 Juli 1936 ketika menyaksikan kondisi umat Islam yang sangat mudah mengkafirkan dan membid'ahkan sesama Muslim. MIAI merupakan satu-satunya wadah persatuan umat Islam di Indonesia yang senantiasa memperjuangkan kemaslahatan Islam, termasuk mengajukan tuntutan hukum agar penjajah Belanda menindak tegas pelaku penistaan agama Islam dengan membentuk Komisi Pemberantas Penghinaan Islam dalam Kongres Muslimin Indonesia ke-3 di Solo

tanggal 7-8 Juli 1941. MIAI juga bekerja sama dengan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dalam menyalurkan aspirasi politik rakyat Indonesia pada tahun 1939.

Ahmad Syafii Maarif di dalam bukunya *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* menjelaskan bahwa MIAI yang sangat menentang kolonialisme kemudian dibubarkan penjajah Jepang pada 24 Oktober 1943 dan diganti Masyumi dengan harapan lembaga ini dapat mudah dikontrol oleh pemerintah kolonial. Sebagaimana MIAI, ormas besar Islam yang menjadi pendukung utama Masyumi adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Karena Jepang membutuhkan bantuan agar memenangkan perang Asia Timur Raya, maka dibentuklah Shumubu (Kantor Departemen Agama) yang mula-mula dikepalai oleh Kolonel Horie (dari Jepang), kemudian digantikan Husein Djajadiningrat, dan selanjutnya dipimpin KH Hasyim Asy'ari demi mendapatkan dukungan umat Islam melalui pengaruh besar dan kewibawaan Hadratusy Syaikh. Kaum Muslimin juga memaksimalkan sikap lunak Jepang yang berbeda dari Belanda itu dengan membentuk pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dikomandani oleh ulama untuk mempertahankan tanah air Indonesia.

### **MENYIKAPI KONFLIK KEPENTINGAN DAN INTERVENSI PENGUASA**

Ahmad Syafii Maarif melanjutkan bahwa setelah diterbitkan maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 mengenai pembentukan partai-partai politik di Indonesia, maka dalam Mukhtamar Umat Islam tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta ditetapkanlah Masyumi sebagai partai politik Islam satu-satunya di Indonesia. Sambutan luar biasa ditunjukkan oleh kaum Muslimin, terutama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Di dalam pedoman partainya disebutkan bahwa Masyumi merupakan partai Islam yang menjunjung prinsip musyawarah, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan toleransi dalam rangka menciptakan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* (negara yang berkeadilan dan diliputi ampunan Allah Swt) dengan berdasarkan ajaran agama Islam.

Namun kesatuan umat Islam itu terkoyak ketika mereka dalam berinteraksi justru lebih menonjolkan fanatisme kelompok masing-masing daripada kemaslahatan bersama. Pada 1947 Partai Sarekat Islam Indonesia meninggalkan Masyumi untuk mendapatkan jabatan politik di kabinet Amir Syarifuddin. Peristiwa yang menggoncang persatuan umat Islam terjadi tatkala Nahdlatul Ulama (dengan jumlah pengikutnya yang sangat besar) menyatakan keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik terpisah berdasarkan keputusan muktamar NU ke-19 di Palembang tanggal 28 April sampai 1 Mei 1952.

Kelompok-kelompok non-Masyumi (yakni NU, PERTI, dan PSII) juga membentuk perhimpunan tersendiri bernama Liga Muslimin Indonesia pada 30 Agustus 1952. Akibatnya, perolehan suara partai Masyumi di pemilu 1955 berada di bawah Partai Nasional Indonesia. Sedangkan posisi partai NU di urutan ketiga di atas Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya itu, partai Masyumi pun kemudian berakhir tragis setelah dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Sebaliknya, partai NU tidak mengalami nasib seperti yang menimpa Masyumi karena NU bersikap akomodatif dan mendukung penuh terhadap kepemimpinan Soekarno. Perbedaan sikap politik NU itu didasari prinsip kehati-hatian dan menghindari bahaya besar (*akhaffudl dlararain*) sesuai situasi pemerintahan demokrasi terpimpin saat itu yang sangat represif.

Kalangan NU menilai Masyumi terlalu didominasi oleh kelompok modernis dan perorangan. Idham Khalid (tokoh NU), sebagaimana dikutip Lathiful Khuluq dalam *Kyai*

*Haji Hasyim Asy'ari's Thought and Political Activities (1871-1947)*, mengatakan bahwa empat jatah menteri telah diambil Masyumi, sedangkan NU hanya meminta satu kementerian agama dan itupun tidak dipenuhi. Bahkan, menurut Choirul Anam, NU yang sebelumnya sering diremehkan telah berupaya membentuk Biro Politik NU pada tahun 1947 yang bertugas menyelesaikan konflik dengan Masyumi, namun tidak direspon. Adapun pihak non-NU (di antaranya Ahmad Hassan dari Persatuan Islam) yang tidak menyetujui keputusan pemisahan NU dari Masyumi memandang bahwa NU telah melupakan wasiat ukhuwah Islamiyah KH Hasyim Asy'ari. Demikian ditulis oleh Remy Madinier dalam penelitiannya mengenai Masyumi.

Kondisi perpecahan politik umat Islam itu dibaca dengan jeli dan dimanfaatkan oleh kalangan nasionalis sekuler yang dengan mudah mempermainkan dan melemahkan kekuatan Islam. Keterpurukan umat Islam semakin parah ketika penguasa menerapkan kebijakan keras kepada siapa saja yang beroposisi dan melawan kebijakan politik pemerintah Indonesia dengan menyematkan tuduhan radikal, kontra-revolusi, anti Nasakom, anti UUD 1945, maupun anti Pancasila. Strategi "politik belah bambu" dijalankan penguasa sehingga kelompok Islam yang mendukung pemerintah diangkat setinggi-tingginya, sedangkan kelompok Islam yang berseberangan diinjak serendah-rendahnya.

Meskipun pada perkembangan berikutnya umat Islam diperbolehkan menyalurkan hasrat politiknya dalam wadah kepartaian, tetapi perpecahan politik itu belum teratasi. Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) yang terbentuk tahun 1967 tidak berhasil merehabilitasi Masyumi pada era Orde Baru. Partai Persatuan Pembangunan yang seakan-akan menjadi wadah penghimpun partai-partai Islam pada tahun 1973 tidak berkulit menghadapi dominasi penguasa (Golkar beserta birokrasinya). Demikian pula, kegagalan partai-partai Islam yang muncul setelah era reformasi 1998. Apalagi hingga kini tidak dijumpai figur teladan yang mampu mempersatukan aspirasi politik umat Islam.

Berkaca dari persoalan di atas, kaum Muslimin dituntut untuk mengoptimalkan kemampuannya serta merekatkan kembali jalinan komunikasi ukhuwah Islamiyahnya, baik melalui jalur politik maupun sosial kemasyarakatan. Partai-partai politik berbasis Islam dan para pemilihnya berasal dari kalangan penganut Islam (yang sejak pemilu pertama hingga sekarang tidak pernah meraih capaian politik di atas partai-partai non-Islam karena kerapuhan ikatan ideologis Islam mereka) seharusnya mengutamakan kemaslahatan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini dan tidak terjebak dalam kepentingan pragmatis golongan maupun sektarian.

Lembaga Majelis Ulama Indonesia yang mewadahi ormas-ormas Islam diharapkan dapat semakin responsif terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan sambil tetap mempertahankan independensinya dalam menyampaikan tuntunan keislaman dan menyerukan pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata. Segala perselisihan di antara umat Islam harus dihentikan segera. Seluruh ormas Islam (terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang merupakan ormas Islam terbesar) semestinya berjalan seiring dalam memperjuangkan Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemuka Islam yang menduduki jabatan di pemerintahan seyogyanya memaksimalkan peranan dan kewenangannya untuk kemaslahatan bersama, menciptakan kerukunan sesama Muslim dan juga dengan penganut agama lainnya, serta mendorong aparat pemerintah agar berlaku adil kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi, baik kepada pendukung maupun pengkritik pemerintah sehingga kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran terwujud.